KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng – Jakarta Pusat 10310 Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227 Website www.komnasham.go.id

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 06/SP/VI/2014

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang Paripurna pada Selasa-Rabu, 3-4 Juni 2014 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna, Selasa-Rabu, 3-4 Juni 2014:

1. Pemilihan Pimpinan Sidang;
2. Usulan dan pengesahan agenda Sidang Paripurna 3-4 Juni 2014;
3. *Review* Keputusan Sidang Paripurna 6-7 Mei 2014 dan *Progress Report*;
4. Laporan kegiatan Pimpinan dan Subkomisi;
   - Laporan Pimpinan
   - Laporan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan;
   - Laporan Subkomisi Mediasi;
   - Laporan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;
   - Laporan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;

1. *Current issues* dan usulan penyikapan;
   - Penasehat Komnas HAM yang menjadi ketua tim sukses pemenangan capres-cawapres;

- Intoleransi;
- Sikap dan posisi Komnas HAM dalam menghadapi pilpres 2014 dan independensi Komnas HAM;
- Kesimpulan Komite Ekosob PBB untuk pemerintah Indonesia;
- Pemotongan anggaran Komnas HAM tahun 2014 oleh Kementerian Keuangan;

2. Laporan Perkembangan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pengungkapan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 13 (Tiga Belas) Aktivis 1997/1998 (termasuk sikap Komnas HAM pasca dilaporkannya Komnas HAM pada Ombudsman);
3. Pembahasan website dan IT Komnas HAM;
4. Laporan Sekretaris Jenderal mengenai:
   - Rencana Evaluasi Kinerja– Semester Pertama;
   - Percepatan penyerapan anggaran dengan membuka blokir kegiatan pembuatan aplikasi;
5. Pembahasan Rancangan Pedoman Kerjasama Komnas HAM dengan pihak ketiga oleh Komisioner Dianto Bachriadi;
6. Laporan perkembangan rancangan langkah kerja Tim Audit HAM Papua oleh Komisioner Natalius Pigai;
7. Penetapan koordinator masing-masing subkomisi oleh Sidang Paripurna;
8. Laporan Tim Timor Leste untuk Anak Hilang oleh Komisioner Sandrayati Moniaga;
9. Pembahasan Seminar Internasional "Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu" oleh Komisioner Roichatul Aswidah;
10. Pelaksanaan 5 (lima) kegiatan di Subkomisi Pengkajian dan Penelitian di tahun 2013 dan Kegiatan rutin subkomisi lainnya berkaitan dengan Tim Pemantauan Pemilu;

11. Pembahasan Kertas Posisi "Penanganan Bencana dan Pengungsi" oleh Komisioner Muhammad Nurkhoiron;
12. Pembahasan Kertas Posisi "Korupsi dan HAM" oleh Komisioner Maneger Nasution;
13. Pembahasan Kertas Posisi "*Human Rights Defender*" oleh Komisioner Siti Noor Laila;
14. Pembahasan rekomendasi untuk Tim Kajian Terorisme;
15. Laporan *Capacity Assesment* yang dilakukan APF oleh Ketua Komnas HAM;
16. Lain-lain;
    - Kegiatan di Kedubes Belanda;
    - Penataan staf;
    - Hasil pertemuan dengan Wakapolri;
    - rencana debat capres-cawapres terkait isu HAM, dan
17. Penutup.

II. Keputusan Sidang Paripurna 3-4 Juni 2014

1. Sidang Paripurna 3-4 Juni 2014 dipimpin oleh Komisioner Hafid Abbas selaku Ketua Sidang dan Komisioner Ansori Sinungan selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna bersifat terbatas;
3. Menugaskan pimpinan untuk melakukan rapat bersama dengan Sekretaris Jenderal, KPA, serta para kepala biro guna pembenahan dan penyehatan sistem pengelolaan dan penggunaan anggaran agar sesuai dengan kewenangan masing-masing;
4. Menugaskan Komisioner Dianto Bachriadi selaku Pelapor Khusus

isu Agraria untuk menyiapkan Kertas Posisi untuk disampaikan pada Sidang Paripurna Juli 2014;

5. Menugaskan Komisioner Muhammad Nurkhoiron untuk menyelesaikan Sistem Informasi Manajemen Komnas HAM termasuk di dalamnya permasalahan IT dan website;

6. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penyelesaian perubahan nama untuk Biro Administrasi Pemajuan HAM dan Administrasi Penegakan HAM paling lambat akhir Juni 2014 dan melaporkannya pada Sidang Paripurna Juli 2014;

7. Menugaskan Pimpinan untuk mengirim surat resmi dan melakukan komunikasi langsung dengan Moh. Mahfud MD terkait jabatannya sebagai penasehat Komnas HAM yang menjadi ketua tim pemenangan capres-cawapres. Pada prinsipnya Komnas HAM menghormati pilihan beliau dan demi independensi Komnas HAM maka status Moh. Mahfud MD sebagai penasehat Komnas HAM non-aktif;

8. Menugaskan pimpinan untuk mengirim surat kepada Presiden RI mengenai sikap dan pandangan tegas Komnas HAM atas intoleransi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;

9. Terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, mengingatkan para komisioner dan pegawai Komnas HAM tetap menjaga independensi dengan cara tidak memihak pada salah satu pasangan capres-cawapres dan bekerja sesuai dengan mandat, prosedur, dan SOP yang ada;

10. Menugaskan pimpinan mengirim surat kepada KPU yang berisikan penyesalan atas sikap KPU yang tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Komnas HAM sebagai lembaga negara berkaitan

dengan persyaratan capres-cawapres 2014 berkaitan dengan hak asasi manusia;

11. Menugaskan kepada Wakil Ketua Eksternal untuk mengumpulkan seluruh rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh PBB kepada pemerintah Indonesia. Komnas HAM akan mempublikasikan hasil rekomendasi tersebut dalam bahasa Indonesia setelah melalui proses editing oleh Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;
12. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk melakukan negoisasi kepada pihak-pihak terkait (Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, DPR, dan Bappenas) mengenai pemotongan anggaran Komnas HAM tahun 2014 oleh Kementerian Keuangan RI;
13. Menugaskan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pengungkapan Peristiwa 13 (tiga belas) Aktivis 1997-1998 Yang Masih Dinyatakan Hilang untuk terus melakukan langkah-langkah konkrit sesuai mandatnya;
14. Menetapkan Komisoner Muhammad Nurkhoiron sebagai Koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan menggantikan Komisioner Hafid Abbas, menetapkan kembali Komisoner Nur Kholis sebagai Koordinator Subkomisi Mediasi, dan menetapkan kembali Komisoner Roichatul Aswidah sebagai Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;
15. Memperpanjang Tim Timor Leste untuk Anak Hilang yang dalam pelaksanaannya melakukan koordinasi dengan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, dan Subkomisi Mediasi untuk pendanaan tim dan dilaporkan pada Sidang Paripurna Juli 2014;
16. Menunda pelaksanaan Seminar Internasional "Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu" setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan dilaksanakan sebelum penetapan Presiden dan Wakil presiden oleh KPU dengan

mengundang narasumber para pejabat negara (DPR dan MPR) terpilih dengan penyesuaian tema "Rekonsiliasi Nasional";

17. Memutuskan untuk tidak membuka lowongan dan/atau mengangkat pegawai tidak tetap (PTT) Komnas HAM sampai dikeluarnya rekomendasi dari Tim Penataan Kelembagaan;

18. Memutuskan pembentukan Tim Bentukan Paripurna dengan melibatkan para tokoh dan ahli di luar Komnas HAM untuk menindaklanjuti Laporan Tim Kajian Terorisme berdasarkan UU 39/1999 dengan masa kerja 3 (tiga) bulan sejak diputuskan. Anggota Tim adalah Dianto Bachriadi (ketua), Siane Indriani, Nur Kholis, Siti Noor Laila, dan 3 (tiga) orang dari luar Komnas HAM (dengan kandidat yang perlu dikonfirmasi antara lain: Bambang Widodo Umar, Enny Soeprapto, Oegro Seno, Fadillah Agus, dan Herlambang);

19. Menetapkan pertemuan perumusan visioning Komnas HAM pada Kamis-Jum'at, 5-6 Juni 2014 dimulai pukul 14.00 dan harus dihadiri oleh 13 (tiga belas) komisioner;

20. Memutuskan untuk mengadakan rapat khusus diantara komisioner untuk membuat tanggapan atas hasil rekomendasi "*capacity assesment*" yang dilakukan APF pada saat visioning 13 komisioner;

21. Menugaskan kepada Komisioner Maneger Nasution untuk menyampaikan isu-isu HAM di Indonesia ke KPU agar menjadi tema dalam debat capres-cawapres antara lain: (i) 7 (tujuh) peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, (ii) hak minortitas, (iii) penyelesaian secara komprehensif atas konflik-konflik agraria termasuk di kawasan hutan dan hak masyarakat adat, (iv) isu-isu internasional tentang hak asasi manusia, (v) solusi penyelesaian HAM di Papua, (vi) Buruh Migran Indonesia (BMI) yang menghadapi hukuman mati, dan (vii) sikap capres-cawapres untuk meratifikasi Statuta Roma;

22. Menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan mutasi pegawai dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang sesuai dengan kerangka penataan kelembagaan;

23. Menunda pembahasan: (i) Kertas Posisi "Penanganan Bencana dan Pengungsi", (ii) "Korupsi dan HAM", dan (iii) Rancangan Pedoman Kerjasama Komnas HAM dengan pihak ketiga pada Sidang Paripurna Juli 2014;

24. Menunda pembahasan Kertas Posisi "*Human Rights Defender*" pada Sidang Paripurna Agustus 2014; dan

25. Bahwa agenda: (i) pemotongan anggaran tahun 2014 oleh Kementerian Keuangan, (ii) rencana evaluasi kinerja-pertama, dan (iii) percepatan penyerapan anggaran dengan membuka blokir kegiatan pembuatan aplikasi menjadi agenda Rapat Koordinasi 5 Juni 2014;

Jakarta, 04 Juni 2014

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

1. Hafid Abbas/Ketua .....
2. Ansori Sinungan/WakilKetua .....
3. Siane Indriani/WakilKetua .....
4. Dianto Bachriadi/Anggota .....
5. M. Imdadun Rahmat/Anggota .....
6. Maneger Nasution/Anggota .....

7. Muhammad Nurkhoiron/Anggota .....

8. Natalius Pigai/Anggota .....

9. Nur Kholis/Anggota .....

10. Otto Nur Abdullah/Anggota .....

11. Roichatul Aswidah/Anggota .....

12. Sandrayati Moniaga/Anggota .....

13. Siti Noor Laila/Anggota .....